

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Firm Size*

2.1.1.1. Definisi *Firm Size*

Bambang Riyanto (2011:313) mendefinisikan bahwa:

“Ukuran Perusahaan yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan, atau nilai aktiva”.

Jogiyanto Hartono (2013:282) menyatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain).”

Brigham dan Houston (2013:4) mendefinisikan bahwa:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total *asset*, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan atau *firm size* adalah nilai yang dapat menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan apabila dilihat dari total aktiva, ekuitas, penjualan, rata-rata penjualan dan sebagainya.

2.1.1.2. Jenis *Firm Size*

Menurut pendapat Badan Standarisasi Nasional, terdapat 3 jenis ukuran perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan Kecil (*Small Firm*)

Perusahaan kecil adalah jenis perusahaan yang memiliki kekayaan bersih

paling banyak Rp200.000.000 dimana belum termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki omzet penjualan paling sedikit Rp1.000.000.000.

2. Perusahaan Menengah (*Medium Size*)

Perusahaan menengah adalah jenis perusahaan yang memiliki kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan paling banyak Rp10.000.000.000, dan memiliki omzet penjualan lebih dari Rp1.000.000.000 namun tidak lebih dari Rp50.000.000.000.

3. Perusahaan Besar (*Large Firm*)

Perusahaan besar adalah jenis perusahaan yang memiliki kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan lebih dari Rp10.000.000.000 dan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000.

2.1.1.3. Pengukuran *Firm Size*

Firm Size merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Biaya agensi dalam perusahaan besar lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar perlu mengungkapkan informasi yang relatif lebih banyak (Jensen dan Meckling (1976) dan Stanga (1976) dalam Firmaningtyas dan Kusumastuti (2019).

Firm size merupakan skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva pada akhir tahun. Semakin besar aktiva maka modal yang ditanam semakin banyak, semakin banyak penjualan maka perputaran uang semakin banyak, dan semakin besar pula kapitalisasi pasar maka semakin besar pula suatu perusahaan dikenal oleh masyarakat. Dari ketiga variabel tersebut, aktiva dipilih sebagai proksi dari pengukuran variabel *firm size* karena relatif lebih stabil dibandingkan dengan

nilai *market capitalized* dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan (Sudarmaji, Sularto, 2007). Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282), ukuran perusahaan dapat dihitung dengan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total Aktiva}$$

(Jogiyanto Hartono,2013:282)

Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang (Al Haryono Jusup, 2012:28). Sedangkan total aktiva berarti jumlah atau total keseluruhan kekayaan perusahaan yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Berikut merupakan penjelasan mengenai aktiva lancar dan aktiva tetap:

1. Aktiva Lancar

Menurut Kasmir (2010:76), aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan paling lama satu tahun. Aktiva lancar digunakan oleh perusahaan untuk sesuatu yang segera harus dibayarkan seperti utang yang sudah jatuh tempo, dan pembayaran atas pembelian suatu barang atau jasa. Komponen yang termasuk ke dalam aktiva lancar diantaranya adalah kas, rekening pada bank (giro dan tabungan), deposito berjangka (*time deposit*), surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan aktiva lancar lainnya.

2. Aktiva Tetap

Menurut Kasmir (2010:77), aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun.

Aktiva tetap memiliki nilai guna yang panjang, terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Komponen yang terdapat dalam aktiva tetap berwujud diantaranya tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan. Sedangkan kompoen yang terdapat dalam aktiva tetap tidak berwujud diantaranya *goodwill*, hak cipta, lisensi, dan merek dagang.

2.1.2. Return on Investment

2.1.2.1 Definisi Return on Investment

Syamsudin (2011:63) mendefinisikan bahwa:

“*Return on Investment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return on Investment* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan”.

Harahap (2013:63) mendefinisikan bahwa:

“Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. *Return on Investment* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva”.

Kasmir (2017:202) mendefinisikan bahwa:

“*Return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Return on Investment* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi perusahaan.

2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi *Return on Investment*

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi *Return on Investment* (Hesty Mariyati Lumbanraja, 2014:18) yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan.

Tingkat perputaran aktiva dihitung untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya. Selain itu perhitungan perputaran aktiva tetap juga dapat membantu pertimbangan perkembangan usaha.

2. *Profit margin* dan besar keuntungan operasi yang dinyatakan dalam presentase dan jumlah penjualan bersih.

Hasil perhitungan *profit margin* menunjukkan besarnya keuntungan dari setiap 1 rupiah penjualan sehingga akan dapat diketahui besarnya efisiensi sebuah perusahaan.

Kedua faktor di atas berpengaruh terhadap perubahan *Return on Investment*. Apabila *profit margin* meningkat maka *return on investment* meningkat, baik dengan cara efisiensi sektor produksi, penjualan, dan lain-lain. Dan *return on investment* akan meningkat apabila perputaran aktiva (*asset turnover*) besar.

2.1.2.3 Kelebihan *Return on Investment*

Menurut Abdullah (2013:46) terdapat kelebihan *Return on Investment* (ROI) yaitu sebagai berikut:

1. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi, baik penggunaan modal, produksi, maupun efisiensi penjualan.

2. Analisis ROI digunakan untuk pengukuran profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
3. ROI berguna sebagai alat kontrol, juga berguna untuk perencanaan. Misalnya ROI digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika perusahaan akan mengadakan ekspansi.

2.1.2.4 Kelemahan *Return on Investment*

Selain memiliki kelebihan, menurut Abdullah (2013:46) terdapat pula kelemahan dalam *Return on Investment* (ROI) yaitu sebagai berikut:

1. Sukar membandingkan *Rate of Return* suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, mengingat bahwa praktek akuntansi yang digunakan masing-masing perusahaan berbeda.
2. Analisa ROI tidak dapat digunakan untuk membandingkan antara dua perusahaan atau lebih dengan hasil yang memuaskan.

2.1.2.5 Pengukuran *Return on Investment*

Return on Investment (ROI) menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROI maka semakin baik suatu perusahaan, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi suatu perusahaan (Kasmir 2017:202).

Menurut Kasmir (2017:208) rata-rata industri untuk rasio ini adalah 30%.

Return on Investment dapat dihitung dengan:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earning After Interest Tax (EAT)}}{\text{Total Asset}}$$

(Kasmir, 2017:201)

Earning After Interest Tax (EAT) merupakan laba bersih yang diperoleh dari laba operasi dikurangi oleh pajak. Secara umum perhitungan EAT dapat dilakukan sebagai berikut:

$$\text{EAT} = \text{Pendapatan} - \text{Biaya} - \text{Pajak}$$

2.1.3 Debt To Equity Ratio

2.1.3.1 Definisi Debt to Equity Ratio

Kasmir (2010:112) mendefinisikan bahwa:

“*Debt to Equity Ratio* berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan, dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang”.

Abdul Halim (2013:56) mendefinisikan bahwa:

“*Debt to Equity Ratio* menunjukkan berapa rupiah modal sendiri yang disediakan untuk membayar utang”

V. Wiratma Sujarweni (2019) mendefinisikan bahwa:

“*Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas) merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* merupakan perbandingan antara kewajiban dan ekuitas dalam perusahaan sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal yang ada untuk memenuhi kewajibannya.

2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Debt to Equity Ratio

Menurut Gill and Chatton (2006:44) yang dialih bahasakan oleh Dwi

Prabaningtyas terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Debt to Equity Ratio* yaitu sebagai berikut:

1. Kenaikan atau penurunan utang
2. Kenaikan atau penurunan modal sendiri
3. Utang atau modal sendiri tetap
4. Utang meningkat lebih tinggi dibandingkan modal sendiri, atau sebaliknya

Dengan kata lain, semakin rendah utang dan semakin tinggi modal sendiri akan membuat *Debt to Equity Ratio* menjadi rendah, sehingga beban dalam membayar bunga pinjaman dapat berkurang.

2.1.3.3 Pengukuran *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio menggambarkan perbandingan antara kewajiban dengan ekuitas dalam perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan kewajibannya (Sutrisno, 2012:210). Menurut Kasmir (2017:164), rata-rata industri untuk rasio ini adalah 90%. Apabila nilai *Debt to Equity Ratio* lebih tinggi dari rasio industri, maka perusahaan dianggap kurang baik karena memiliki kewajiban yang tinggi dan cenderung bergantung pada pihak ketiga (kreditor). Adapun pengukuran *Debt to Equity Ratio* adalah sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Utang\ (Debt)}{Ekuitas\ (Equity)}$$

Menurut Kasmir (2010: 124)

Berdasarkan rumus di atas terdapat dua komponen dalam mengukur *Debt to Equity Ratio* yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban

Menurut Fahmi (2012:80) kewajiban atau utang adalah "... kewajiban ekonomi yang mungkin di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lampau".

Total utang (kewajiban) yang dimaksud dalam rumus perhitungan di atas adalah seluruh total utang perusahaan baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dalam satu periode akuntansi.

2. Ekuitas

Ekuitas merupakan klaim pemilik atas aset bersih perusahaan (Subramanyam, 2014:170). Ekuitas biasanya terdiri dari modal disetor, laba ditahan, modal dari penilaian kembali, dan modal hibah atau sumbangan.

Semakin rendah *Debt to Equity Ratio* maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Sedangkan apabila *Debt to Equity Ratio* semakin besar, berarti semakin besar dana yang digunakan sebagai pembiayaan yang berasal dari pihak luar (Marli 2010: 269).

2.1.4 Kepemilikan Saham Publik

Seiring dengan perkembangan suatu perusahaan, tugas dan semua fungsi dalam pengelolaan suatu perusahaan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemilik perusahaan saja. Maka dari itu, pemilik perusahaan perlu menunjuk pihak lain

(agen) yang profesional untuk melaksanakan tugas mengelola kegiatan yang lebih baik. Pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan disebut dengan struktur kepemilikan. Menurut Yuniati dkk (2016), struktur kepemilikan terdiri dari :

- a. Kepemilikan Manajerial, yaitu suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan sehingga manajer memiliki peran ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham dalam perusahaan.
- b. Kepemilikan Institusional, yaitu kepemilikan saham dalam perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, investasi dan institusi lain.
- c. Kepemilikan publik, yaitu kepemilikan saham dalam perusahaan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

2.1.4.1 Definisi Kepemilikan Saham Publik

Menurut Nurul dan I.A Sri (2019) untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan memerlukan pendanaan yang dapat diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh dari penjualan saham kepada masyarakat (publik).

Wijayanti (2009:20) mendefinisikan bahwa:

“Kepemilikan publik adalah proporsi atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan”.

Istiqomah (2010) mendefinisikan bahwa:

“Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar”.

Yunitasari (2014) mendefinisikan bahwa:

“Kepemilikan publik merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*)

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham publik yaitu proporsi saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat di luar perusahaan yang dinyatakan dalam persen (%).

2.1.4.2 Jenis-jenis Saham

Menurut Jogiyanto Hartono (2016), saham dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Saham Biasa (*common stock*), yaitu saham yang memberikan hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan dan hak preemptif (hak presentasi) bagi para pemegangnya.
2. Saham Preferen (*preferred stock*), merupakan gabungan dari sifat saham biasa dan obligasi. Dalam saham ini, pemegangnya memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pembagian yang tetap serta memiliki hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi.
3. Saham treasuri (*treasury stock*), yaitu saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasuri yang nantinya dapat dijual kembali.

2.1.4.3 Pengukuran Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan saham publik yaitu proporsi saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat di luar perusahaan yang dinyatakan dalam persen (%). Pengertian publik disini adalah pihak individu yang memiliki saham di bawah 5%

(<5%) yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan sehingga tidak memiliki kendali terhadap perusahaan (Rifqiyah, 2016).

Menurut Wijayanti (2009:20), porsi kepemilikan saham oleh publik dapat diukur menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Kepemilikan saham publik} = \frac{\text{Total Saham Publik}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Wijayanti (2009:20)

2.1.5 Voluntary Disclosure

2.1.5.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1, Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi:

a. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode;

Laporan Posisi Keuangan digunakan untuk menunjukkan besarnya aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan dalam periode tertentu.

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain selama periode;

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain mulai digunakan sejak diberlakukannya PSAK 1 dalam rangka konvergensi dengan IFRS. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan

perusahaan dalam periode tertentu yang terdiri dari laba/rugi, rincian penghasilan, beban serta pendapatan komprehensif lain.

c. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode;

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan besarnya ekuitas perusahaan pada periode tertentu yang dipengaruhi oleh laba/rugi operasi.

d. Laporan Arus Kas selama periode;

Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar yang ada di perusahaan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain dari laporan keuangan yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain beberapa poin di atas termasuk pula skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya di perusahaannya. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi (Hans, 2016:126).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9, kebutuhan informasi laporan keuangan berbeda tergantung pada penggunaannya. Pengguna laporan keuangan meliputi:

a. Investor

Investor memerlukan informasi untuk mengambil keputusan berkaitan dengan investasi yang dilakukannya. Informasi dalam laporan keuangan membantu investor menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut sehingga dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar deviden.

b. Karyawan

Informasi yang diperlukan oleh karyawan dalam laporan keuangan menyangkut stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, karyawan juga memerlukan informasi mengenai kinerja perusahaan sehingga memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja dan kesempatan kerja.

c. Pemberi Pinjaman

Informasi dalam laporan keuangan digunakan untuk memutuskan apakah perusahaan mampu membayar pinjaman beserta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d. Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Informasi dalam laporan keuangan memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah utang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

e. Pelanggan

Pelanggan menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kelangsungan hidup entitas.

f. Pemerintah

Informasi dalam laporan keuangan digunakan untuk menetapkan kebijakan pajak, serta untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

g. Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir entitas serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.5.2 Pengungkapan Laporan Keuangan

Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yang disajikan dalam seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2014:578). Pengungkapan laporan keuangan merupakan konsep, metode, dan media untuk menyampaikan informasi laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Suwardjono (2014:580) terdapat tiga tujuan dalam pengungkapan, meliputi:

a. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai mampu memperoleh informasi dan mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik dari suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain pengungkapan ini dimaksudkan untuk melindungi pemakai dari manajemen yang kurang adil dan kurang terbuka.

b. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan kecanggihannya tertentu sehingga pengungkapan diarahkan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

c. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan melindungi dan informatif. Apa yang diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara. Untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir yang memuat pengungkapan secara rinci.

Menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2014:581) terdapat tingkatan dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan, yaitu:

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Tingkatan ini berisi informasi minimum yang harus diungkapkan atau dipenuhi agar *statement* keuangan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Tingkatan ini merupakan tingkat yang harus dicapai agar tidak ada pihak yang kurang mendapat informasi sehingga dapat merugikan pihak tersebut. Artinya, tingkatan ini harus dipenuhi agar semua pihak yang membutuhkan

informasi dalam laporan keuangan mendapatkan perlakuan dan informasi yang sama.

3. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Tingkatan ini menuntut adanya penyajian laporan keuangan secara penuh terkait semua informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

Pengungkapan laporan keuangan umumnya dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan pasar modal suatu negara (Healy & Palepu, 2001). Di Indonesia, pengungkapan laporan keuangan ini diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Ikhtisar pengungkapan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a) Gambaran Umum Emiten atau Perusahaan Publik

Bagian ini berisi penjelasan mengenai hal-hal yang wajib diungkapkan yaitu diantaranya mengenai pendirian emiten atau perusahaan publik; penawaran umum efek; struktur emiten atau perusahaan publik, entitas anak, karyawan, direksi, komisaris dan komite audit; dan penerbitan laporan keuangan.

b) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Hal yang wajib diungkapkan dalam bagian ini adalah pernyataan kepatuhan terhadap SAK; Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; Penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi signifikan oleh manajemen; dan kebijakan akuntansi tertentu.

c) Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam bagian ini adalah penjelasan mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, pendapatan dan beban lainnya serta pendapatan komprehensif lain.

d) Pengungkapan lainnya

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam bagian ini adalah transaksi pihak berelasi, pajak penghasilan; penurunan nilai aset non keuangan; kombinasi bisnis; bagian partisipasi dalam ventura bersama; aset dan liabilitas dalam mata uang asing; operasi yang dihentikan; laba (rugi) per saham dasar dan dilusian; dividen; nilai derivatif melekat; manajemen risiko keuangan; pengelolaan modal; transaksi non kas; perikatan dan kontijensi; segmen operasi; pembayaran berbasis saham; perubahan estimasi akuntansi, kebijakan esrimasi, dan kesalahan periode lalu; hibah pemerintah dan informasi penting lainnya; peristiwa setelah periode pelaporan; perkembangan terakhir SAK dan peraturan yang terkait dengan aktivitas emiten atau perusahaan publik; reklasifikasi; dan rekonsiliasi antara SAK dengan Standar Akuntansi negara lain.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi dan BAPEPAM (Suwardjono, 2014:583).

2.1.5.3 Pengertian *Voluntary Disclosure*

Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*) diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai laporan keuangan khususnya investor.

Menurut Suwardjono (2014:583), pengertian Pengungkapan Sukarela adalah:

“Pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi dan Peraturan BAPEPAM.”

Menurut Aprianti et al. (2014), pengungkapan sukarela diartikan sebagai berikut:

“Voluntary disclosures is the free choice of company management to provide other information deemed relevant for decision making by the users of its annual report.”

Sedangkan pengertian Pengungkapan Sukarela menurut Sitepu (2015) adalah:

“Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunannya.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan laporan keuangan yang

melebihi pengungkapan wajib, dimana manajemen perusahaan diberikan kebebasan untuk melaporkan informasi yang dianggap relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

2.1.5.4 Tujuan dan Manfaat *Voluntary Disclosure*

Pengungkapan sukarela memiliki manfaat dan tujuan bukan hanya bagi pihak perusahaan saja namun juga bagi para *stakeholder*. Berikut ini merupakan tujuan pengungkapan sukarela menurut Belkaoui dan Raihi (2012) yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar:

1. Menguraikan dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal yang diakui diluar pengungkapan yang dilakukan dalam laporan keuangan.
2. Menguraikan dan memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi hal-hal yang diakui.
3. Memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor dalam menilai resiko dan potensi dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
4. Memberikan informasi yang digunakan pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam beberapa tahun.
5. Memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar di masa depan.
6. Membantu para investor dalam menilai pengembalian dari investasinya.

Sedangkan manfaat pengungkapan sukarela menurut Choi dan Meek (2010:176) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dampak berupa peningkatan likuiditas saham perusahaan.
2. Mampu mengurangi biaya modal (*cost of capital*).

3. Memberikan dampak berupa biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan.
4. Meningkatnya minat analisis keuangan investor.

Berdasarkan penjelasan di atas, *voluntary disclosure* sejatinya memiliki manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi para pemakai laporan keuangan khususnya investor dan calon investor. Perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarela akan memiliki nilai dan kredibilitas yang tinggi di mata investor, sedangkan bagi investor pengungkapan sukarela akan memberikan informasi yang luas sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan

2.1.5.5 Pertimbangan dalam *Voluntary Disclosure*

Menurut Suripto (1999) dalam Khairiah dan Fuadi (2017), faktor yang menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam melakukan pengungkapan secara sukarela yaitu faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Biaya yang harus dipertimbangkan dalam pengungkapan sukarela adalah sebagai berikut:

1. Biaya langsung meliputi biaya pengumpulan data, biaya pemrosesan informasi, biaya pengauditan, dan biaya penyebaran informasi.
2. Biaya tidak langsung meliputi biaya litigasi (biaya hukum) yang timbul karena informasi yang tidak memadai atau menyesatkan, biaya kerugian persaingan (*copetitive disadvantage*) yang timbul apabila informasi yang diungkapkan melemahkan daya saing perusahaan, dan biaya politik yang terjadi ketika praktik pengungkapan memicu regulasi pemerintah.

Selain faktor biaya yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa alasan yang melandasi keengganan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. *Disclosure* akan membantu pesaing dan merugikan pemegang saham.
2. *Disclosure* yang lengkap akan memberikan keuntungan pada serikat pekerja untuk melakukan tawar-menawar upah.
3. Adanya keraguan terhadap kemampuan investor dalam memahami kebijakan dan prosedur akuntansi sehingga *full disclosure* akan menyesatkan mereka.
4. Tersedianya sumber informasi lain dengan biaya yang lebih murah selain laporan keuangan.
5. Kurangnya pengetahuan terhadap kebutuhan investor

2.1.5.6 Teori Terkait *Voluntary Disclosure*

Teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu teori agensi dan teori signal. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing teori:

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Manajer (agen) diartikan sebagai pihak yang menerima wewenang untuk mengelola perusahaan oleh pemilik (prinsipal). Karena diberi wewenang untuk mengelola perusahaan, pemilik mendelegasikan pembuatan keputusan kepada manajer agar hubungan kontraktual antara pemilik dan manajer dapat berjalan dengan lancar (Ramadhani, 2018).

Perbedaan kepentingan antara prinsipal agen seringkali memunculkan konflik keagenan. Pemilik, yang dalam penelitian ini bisa pula disebut dengan investor atau pemegang saham memiliki kepentingan meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui pembagian dividen, sedangkan manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal tetapi juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahtraannya melalui kompensasi. Hal ini membuat manajemen cenderung tidak memberikan informasi yang menyebabkan pengaruh negatif untuk mencapai kepentingannya.

Dalam teori ini dijelaskan pula mengenai asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik (pemegang saham). Hal ini memberikan peluang kepada manajer untuk memanipulasi kinerja perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik.

Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi memunculkan biaya keagenan (*agency cost*) berupa biaya monitoring yang mencakup biaya untuk proses auditing, panganggaran, kontrol dan sistem kompensasi agen. *Agency cost* ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan guna memperkecil konflik keagenan (Sartono, 2012:12). Untuk mengurangi biaya keagenan dan asimetri informasi ini, diperlukan informasi yang transparan dengan dilakukannya pengungkapan sukarela sehingga pemilik dalam hal ini

pemegang saham memperoleh informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan.

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi (Jogiyanto, 2000:392). Pengungkapan informasi akuntansi dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik (*good news*) atau prospek yang buruk melalui sinyal buruk (*bad news*) di masa mendatang.

Perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi dengan memberikan sinyal kepada *stakeholder*, terutama mengenai informasi keuangan dan non keuangan yang dapat dipercaya dan mencerminkan prospek perusahaan kedepan. Pengungkapan sukarela diharapkan dapat digunakan untuk menjadi nilai tambah bagi perusahaan dan menjadi media untuk menyampaikan sinyal-sinyal positif bagi perusahaan.

2.1.5.7 Indeks Pengukuran *Voluntary Disclosure*

Luas *Voluntary Disclosure* diukur menggunakan suatu indeks pengungkapan sukarela. Indeks pengukuran *voluntary disclosure* dalam penelitian ini mengacu pada item yang digunakan sebelumnya dalam penelitian Sehar *et.all* (2013) yang digunakan pula dalam penelitian Wulandari dan Laksito (2015) setelah disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 menghasilkan sebanyak 33 item pengungkapan sukarela (terlampir).

Prosedur dalam memperoleh indeks pengungkapan sukarela adalah sebagai berikut:

1. Memberi skor pada setiap item pengungkapan sukarela secara dikotomi, satu item yang diungkapkan mendapat nilai 1, dan jika tidak diungkapkan mendapat nilai 0.
2. Skor yang diperoleh pada masing-masing perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total atas pengungkapan sukarela.
3. Menghitung Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS) dengan membagi skor total yang diperoleh dengan skor maksimum dari item yang digunakan dalam penelitian ini.

$$IPS = \frac{n}{K}$$

Keterangan:

n = jumlah butir pengungkapan sukarela yang dipenuhi

K = jumlah keseluruhan butir yang mungkin dipenuhi

Semakin tinggi indeks pengungkapan sukarela yang didapatkan oleh suatu perusahaan maka semakin banyak pula item yang diungkapkan. Hal ini menunjukkan perusahaan melakukan pengungkapan informasi yang luas. Angka indeks maksimum dari pengungkapan adalah satu (1). Perusahaan dengan angka indeks satu (1) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan laporan tahunan secara penuh.

2.2 Kerangka Pemikiran

Peusahaan yang telah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya sehingga publik dapat menilai kinerja perusahaan melalui informasi yang ada dalam laporan tahunan. Namun, ketatnya persaingan menuntut manajer untuk menyampaikan pengungkapan informasi yang luas melalui pengungkapan sukarela guna meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan calon investor (Hardiningsih, 2008).

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi dan Peraturan BAPEPAM (Suwardjono, 2014:583).

Voluntary disclosure tidak memiliki peraturan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap perusahaan memiliki item *voluntary disclosure* yang berbeda. Dimana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ada pada perusahaan tersebut. *Voluntary disclosure* dalam penelitian ini diukur menggunakan Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS) dimana item-item pengungkapan sukarela yang dipilih digunakan pula dalam penelitian sebelumnya dan telah disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi *voluntary disclosure* yang pertama adalah ukuran perusahaan atau *firm size*. Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara. Pada penelitian ini, *firm size* diukur menggunakan total aktiva karena dianggap relatif lebih stabil dibandingkan

dengan nilai *market capitalized* dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan (Sudarmaji, Sularto, 2007).

Perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks sehingga berkemungkinan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sehingga perusahaan besar umumnya lebih banyak disoroti oleh publik dan dituntut untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan lebih luas daripada perusahaan kecil sebagai bentuk pertanggung jawabannya (Suta dan Laksito, 2012). Sejalan dengan Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan dalam teori agensi bahwa perusahaan besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil, sehingga berkemungkinan mengungkapkan informasi yang luas dan lebih lengkap.

Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hardiningsih (2008), Wardani (2012), Nugraheni (2012), Mustofa I. Elfeky (2017), Pramesti dan Lahaya (2016), Krishna (2013), Daniel (2013), Neliana (2018) dan Habbash (2016) yang menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dan Merkusiwati (2013) yang menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *voluntary disclosure* dan penelitian yang dilakukan oleh Suhendar dan Hakim (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela.

Return on Investment (ROI) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki

perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2017:202). Dalam penelitian ini, ROI diukur menggunakan *Earning After Tax* dan *Total Asset*. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengoperasikan keseluruhan aktivasnya.

Manajemen cenderung mengungkapkan informasi yang luas ketika memiliki *return* yang tinggi. Dan cenderung menutupi hal-hal yang menyebabkan rendahnya *return* perusahaan. Apabila dikaitkan dengan teori agensi, hal ini dikarenakan manajemen ingin mencapai kepentingannya dengan tidak ingin mengungkapkan hal-hal yang berpengaruh negatif terhadap kepentingannya. Sedangkan bila dikaitkan dengan teori sinyal, maka pihak manajemen terpacu untuk mengungkapkan informasi untuk mengurangi pandangan negatif pasar terhadap kualitas investasi, sehingga dapat membantu perusahaan dalam memperoleh dana (Suta dan Laksito, 2012). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ROI, pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan semakin baik/lengkap.

Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2012) dan Habbash (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan oleh ROI berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*. Wiguna (2013) menyatakan bahwa ROI secara parsial berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningasih (2008) yang menyatakan bahwa ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

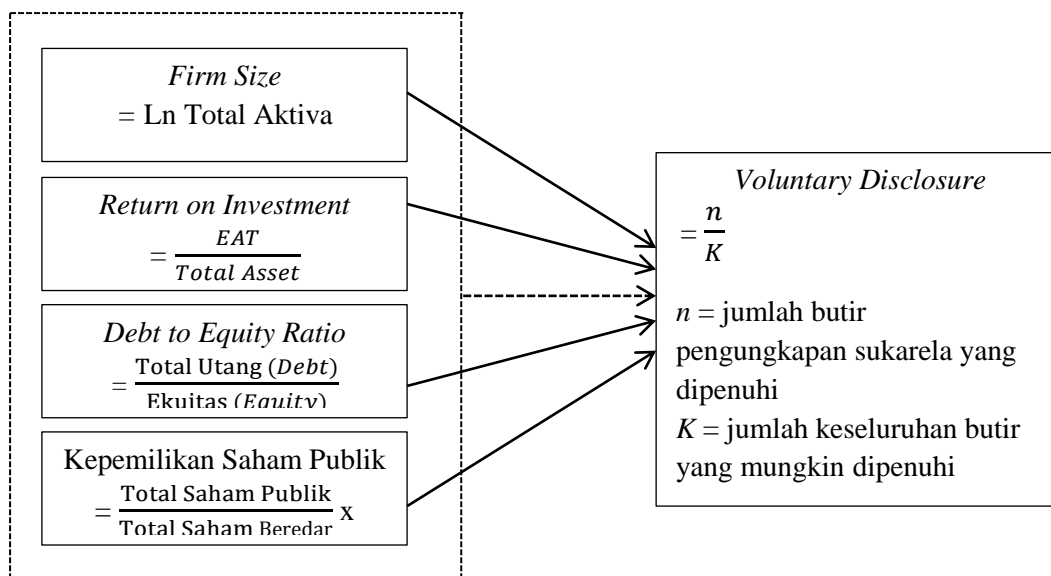
Debt to Equity Ratio menunjukkan hubungan antara pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditur dengan jumlah modal sendiri yang berasal dari pemegang saham. Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur *Debt to Equity Ratio* adalah Total Utang dan Ekuitas. Sejalan dengan teori agensi, Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan menanggung biaya pengawasan tinggi, karena harus menyediakan informasi secara komprehensif. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pula penggunaan utang oleh perusahaan yang dibandingkan dengan total aktiva ataupun dengan modal sendiri (Indrayani dan Chariri, 2014). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* maka pengungkapan laporan keuangan akan semakin lengkap.

Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Chariri (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* yang diproksikan ke dalam *debt to equity ratio* berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Krishna (2013) dan Suhendar dan Hakim (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* yang diproksikan ke dalam *debt to equity ratio* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Atau dapat disimpulkan bahwa *debt to equity ratio* dimungkinkan berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* yang diproksikan ke dalam *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure* dan Habbash (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.

Kepemilikan Saham Publik merupakan proporsi atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Wijayanti, 2009:20). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan saham publik dalam penelitian ini adalah Total Saham Publik dan Total Saham yang Beredar. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Sejalan dengan teori agensi dimana dalam teori ini manajemen (agen) akan memenuhi kebutuhan *stakeholder* (prinsipal) dengan melakukan pengungkapan semaksimal mungkin sesuai keinginan pemegang saham.

Maka dari itu, semakin banyak kepemilikan saham publik memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas karena menyangkut kepercayaan publik terhadap perusahaan. Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2012), Hardiningsih (2008), dan Indriani (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *volutary disclosure*. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2012) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *volutary disclosure*.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dan mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan: _____ = Secara Parsial
 ----- = Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. *Firm Size*, *Return on Investment*, *Debt to Equity Ratio*, dan Kepemilikan Saham Publik secara parsial berpengaruh positif terhadap *Voluntary Disclosure*.
2. *Firm Size*, *Return on Investment*, *Debt to Equity Ratio*, dan Kepemilikan Saham Publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure*.